



MoU Tower Bersama Perlu Dikaji Ulang

YOGYA (MERAPI) - Tiga fraksi di DPRD Kota Yogyakarta, yakni PDIP, Demokrat dan Golkar menyayangkan sikap Pemkot yang dianggap gampang memuluskan PT Indonesia Tower (PT IT) sebagai satu-satunya perusahaan yang akan mengurus tower bersama di Yogya.

Langkah ini dinilai melanggar Keputusan Menteri Informasi dan Komunikasi No 2 tahun 2008 tentang penyelenggaraan tower bersama. "Meski baru sebatas MoU sekitar sebulan lalu, namun Pemkot telah memberikan peluang monopoli kepada PT Indonesia Tower sebagai satu-satunya perusahaan yang mengelola tower bersama," ucap Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Yogyakarta Y Eko Rintarjo kepada wartawan di Gedung Dewan, Senin (22/9).

Dari data Dinas Perizinan, tower yang telah berdiri di Kota Yogyakarta berjumlah 109. Dengan aturan tower bersama tersebut, akan dibangun 55 titik yang tersebar di 14 kecamatan di Kota Yogya. Satu tower mampu menampung delapan provider perusahaan telekomunikasi.

Dikatakan, sesuai Pasal 13, larangan monopoli tower bersama dengan gamblang dijelaskan. Selain itu, dalam Pasal 4, masyarakat harus dilibatkan untuk mengetahui penataan tower. "Jangankan masyarakat, dewan saja tidak pernah diajak bicara," sesalnya.

Lagi pula, lanjut Eko,

penyelenggaraan tower bersama tersebut belum bisa dijalankan. Mengingat Perda Tata Ruang dan Perda IMB saat ini masih dibahas di tingkat dewan. Untuk itu, penandatanganan kesepakatan (MoU) antara Pemkot dengan PT IT perlu dikaji ulang.

Anggota Fraksi Demokrat Supriyanto Untung mengungkapkan, lambatnya pembahasan Perda Tata Ruang ini bukan ada di dewan. Akan tetapi, lanjut dia, bola pembahasan tersebut *mandeg* di jajaran eksekutif. "Sebenarnya Perda ini akan selesai namun Pusat ternyata men-

girkan tenaga bantuan teknis (Bantek) untuk merumuskan draf sehingga harus disusun kembali oleh eksekutif sebelum diserahkan kepada kami," ucapnya.

Anggota Fraksi PDIP lainnya, Henry Kuncoroyekti mengutarakan, sedikitnya ada lima perusahaan yang mendaftarkan lelang terbuka tower bersama tersebut. Namun dalam perjalanannya, Pemkot memilih PT IT sebagai pemenang lelang dan akan menyusulkan satu lagi perusahaan untuk menjadi partner PT IT, untuk menghindari monopoli.

(W-8)-n

epada Yth. :

epada Yth :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Umum	Netral	Segera	Untuk Ditanggapi
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			

Yogyakarta, 24 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005